

Judul : Berantas tambang ilegal, momen koreksi industri timah
Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Berantas Tambang Ilegal Momen Koreksi Industri Timah

ANGGOTA Komisi VI DPR Ahmad Labib mengapresiasi penyerahan sejumlah aset rampasan negara senilai Rp 7 triliun kepada PT Timah Tbk dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Diharapkan, ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.

Dia mengatakan, kasus timah mesti menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai pihak lain dengan cara ilegal dan koruptif. "Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara," ujar Labib, kemarin.

Diketahui, Presiden Prabowo menyerahkan sejumlah aset rampasan negara seperti enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, senilai Rp6-7 triliun kepada PT Timah Tbk untuk dikelola dalam kunjungan kerja Presiden ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Pengelolaan smelter timah hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) ini sebagai bagian dari upaya penataan tambang nasional dan penguatan industri hilir mineral strategis.

Labib melanjutkan, peran PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional mesti diperkuat. Dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor.

Selain itu, penambahan tersebut mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang bernilai ekonomi tinggi. "Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional," tegas Labib.

Labib bilang, hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang. Agenda ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi harga timah secara ketat pasca penyerahan aset tersebut. Kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.

"Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik," kata politikus Golkar ini.

Namun tanpa pengawasan, kata Labib justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Sehingga Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata.

Untuk itu, Labib meminta PT Timah perlu bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain (mengelola dan melacak data rantai pasok). Ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi. ■ TIF